BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris

1. Dasar Hukum Kewarisan

Penulis mengutip dari kitab *Hasyiyah Al-alamah Al- syekh ibrahim albaijuri* bahwa:

a. Ayat-ayat yang menerangkan waris dalam Al-Quran

Diantaranya:

Surat An-Nisaa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ... (النساء)
(011:

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki - laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...” (An-Nisaa’:11)

Surat An-Nisaa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ... (النساء : 12).

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak...” (An-Nisaa’: 12)

b. Hadist-hadist yang menjelaskan waris

Seperti Hadist:

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak.

Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.”¹

c. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam KHI buku II hukum kewarisan bab I tentang ketentuan umum poin a menjelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

2. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris ialah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang (pewaris).³

Golongan ahli waris secara luas yang disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki, dan 10 orang perempuan, mereka adalah :

a. Kelompok ahli waris laki-laki

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya kebawah

¹Ibrahim albaijuri, *Hasyiyah Al-alamah Al- syekh ibrahim albaijuri* (Bairut: daru ibni ashoshoh 2005), II: 97

² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Pt Logos Wacana Ilmu, 1999), 195.

³H. M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(Jakarta: Sinar Gravita, 2004), 83-84.

3. Ayah dan seterusnya keatas
 4. Kakek dan seterusnya keatas
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki sebapak
 7. Saudara laki-laki seibu
 8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 10. Paman sekandung
 11. Paman sebapak
 12. Anak laki-laki paman sekandung
 13. Anak laki-laki paman sebapak
 14. Suami
 15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak
- b. Kelompok Ahli Waris Perempuan
1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan pancar laki-laki
 3. Ibu
 4. Nenek dari pihak bapak dan seterusnya keatas
 5. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya keatas
 6. Saudara perempuan sekandung
 7. Saudara perempuan sebapak
 8. Saudara perempuan seibu
 9. Isteri

10. Orang perempuan yang memerdekakan budak⁴

3. Rukun-Rukun Waris

Masalah kewarisan akan timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus ada pewaris (muwarits), seseorang yang telah meninggal dunia.
- b. Harus ada mauruts atau tirkah: ialah apa yang ditinggal pewaris.
- c. Harus ada ahli waris (warits), yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris.⁵

4. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

- a. Kekerabatan dari rahim (nasab)
- b. Nikah
- c. Waris wala' yaitu asobah yang di berikan kepada orang yang memerdekakan budak.⁶

5. Penghalang mendapatkan warisan

- a. Pembunuhan
- b. Budak
- c. Berlainan agama.⁷

⁴ Usman bin Muhammad Syatta, *hasyiyah i' anat al-tholibin* (Bairut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2009), III: 384-385.

⁵Albajuri, *Hasyiyah*, II: 98.

⁶ Ibid, II: 98.

⁷ Syatta, *hasyiyah*, III:383.

6. Syarat-Syarat Waris

- a. Matinya pewaris baik secara hakikat atau putusan hakim
- b. Hidupnya ahli waris baik secara hakikat atau putusan hakim.
- c. Mengetahui hubungan ahli waris dengan pewaris
- d. Mengetahui yang berhak mendapatkan warisan.⁸

B. Ahli Waris Pengganti

Penulis mengutip bukunya Habiburrahman, bahwa Hazairin mengeluarkan teori *receptive exit* untuk menyatakan hasil kajian ijtihadnya tentang hukum kewarisan islam secara bilateral menurut al-Qur'an dan Hadist. teori *receptive exit* di rumuskan berdasarkan rangkaian penalarannya terhadap ayat-ayat hukum kewarisan oleh mahasiswanya yang sekaligus juga sebagai sahabat dan asistennya, yaitu Sayuti Thalib yang kemudian mengembangkan teori baru yang di kenal dengan istilah teori *receptie a contrario*.⁹

Habiburrahman juga menjelaskan bahwa Thoha Jahja menuturkan: dalam TAP MPRS Nomor 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republic Indonesia sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (LN 1960-138) di bidang hukum antara lain di amanatkan pembentukan hukum nasional. Kemudian Hazairin secara individu telah mengambil langkah awal dengan menerbitkan buku-buku hukum kewarisan islam, yang mengadopsi ketiga sistem hukum

⁸Albajuri, *Hasyiyah*, II: 98-99.

⁹ H. Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media 2011), 61.

sebelumnya, yang di akui pemberlakuannya di Indonesia, yaitu: hukum barat (BW), hukum adat, dan hukum islam.¹⁰

Kaitanya dengan kedudukan ahli waris pengganti yang di nyatakan oleh Hazairin sebagai hasil ijtihadnya dan di akui kemujtahidanya oleh pengikut-pengikutnya, pendapatnya tersebut telah di kukuhkan dalam pasal 185 KHI serta diikuti oleh hakim-hakim pada Peradilan Agama seluruh Indonesia. Jika di takar dengan teori kredo dan kedaulatan Tuhan, ketentuan wasiat wajibah cenderung meninggalkan ketentuan waris seperti diatur tegas dalam al-Quran dan Hadist.¹¹

Hazairin melahirkan ketentuan hukum baru, adanya ahli waris pengganti- yang belum pernah di kenal dari ulama madzhab sebelumnya, dengan menerjemahkan ayat al-Quran surat an-nisa' [4]: 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
إِيمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء:
33).

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang di tinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

¹⁰ Ibid. 62.

¹¹ Ibid, 137.

Haizirin membagi ahli waris menurut Al-quran dalam tiga jenis, yaitu: *dzawu-lfaraid*, *dzawu-lqarabat*, dan *mawali*. Pendapat ini berbeda dengan ulama fikih, menurut ulama fikih ahli waris terbagi menjadi: *dzu al-faraid* dan bukan *dzu al-faraid*- bukan *dzu al-faraid* terdiri dari: *ashabah* dan *dzu al-arham*. Pendapat Haizirin tentang *dzawu al-qarabat* mengambil dari pendapat syi'ah, sedangkan *mawali* pendapatnya sendiri.¹²

C. Kompilasi Hukum Islam

KHI di susun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui surat keputusan bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang di laksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Penyusunan KHI dapat di pandang sebagai suatu proses transformasi hukum islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya dapat di rinci pada dua tahapan. *Pertama* tahapan pengumpulan bahan baku, yang di gali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua* tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber

¹² Ibid, 143.

hukum islam (al-Quran dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.¹³

Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur. Jalur pertama penelaahan 38 kitab fiqh dari berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Jalur kedua, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur ketiga, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri dari atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *law report* tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur keempat, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal¹⁴.

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum islam, yakni al-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memerhatikan tatana hukum barat tertulis (terutama hukum eropa kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan

¹³Bisri, *Kompilasi Hukum*, 8.

¹⁴Bisri, *Kompilasi Hukum*, 8.

hukum islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu kedalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum islam yang bercorak keindonesiaan¹⁵.

Di bidang kewarisan dan perwakafan (buku II dan buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqoha (dalam lingkungan tradisi besar, meminjam istilah Redfield) ke dalam bentuk qanun. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau “penggantian ahli waris” (*plaatsvervulling*).¹⁶

Dalam pasal 185 di nyatakan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang di gantikan¹⁷.

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang di gali dari (sumber) nilai-nilai

¹⁵Ibid, 9.

¹⁶ Ibid, 12

¹⁷ Ibid, 12-13

hukum yang di yakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenteraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang di pandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya ikat di dalam masyarakat islam. Dengan demikian KHI layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.¹⁸

D. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren.

“Pondok” secara etimologis berarti bangunan untuk sementara; rumah; dinding bangunan tempat tinggal yang berpetak-petak yang berdinding bilik dan beratap rumbia dan madrasah dan asrama (tempat mengaji atau belajar agama Islam). “Pondok” yang biasa di pakai dalam tradisi Pasundan dan Jawa (Aceh: *Rangkong meunasah*; Sumatera Utara: *Makro Maktab*; Minangkabau: *Surau*). Untuk menyebutkan asrama tempat belajar agama Islam, sebenarnya tidak sama sekali asli nusantara, tetapi merupakan hasil penyerapan dari bahasa Arab *al-funduq* yang berarti hotel; tempat penginapan; pesanggrahan; atau penginapan bagi orang yang bepergian. Hal yang terahir ini beralasan karena tempat

¹⁸Ibid, 15.

belajar para siswa dalam tradisi Hindu-Budha hanya dikenal dengan istilah *asyrama* dan *mandala*, bukan podok (*al-fundug*).¹⁹

Adapun term “pesantren” secara etimologis berasal dari pe-santrian yang berarti tempat santri; asrama tempat santri belajar agama; atau pondok. Sedangkan terminology “santri” sendiri, menurut Zamakhsyari Dhofier, berasal dari ikatan kata “*san*” (manusia baik) dan kata “*tri*” (suka menolong) sehingga santri berarti manusia baik yang suka menolong dan bekerja sama secara kolektif. Menurut Prof. John, sebagaimana dikutip Dhofier, kata “santri” berasal dari bahasa Tamil yang berarti “guru mengaji”. Berbeda dengan Dhofier dan John, Clifford Geertz berpendapat bahwa “santri” berasal dari bahasa India atau Sansekerta “*shastri*” yang berarti ilmuwan Hindu yang pandai menulis, melek huruf (kaum literasi) atau kaum terpelajar.²⁰

Melihat akar bahasa (etimologi) “santri” di atas, maka istilah “santri” dan derivatnya, “pesantren” adalah lebih dekat dengan warisan budaya local pra-Islam. Kebiasaan orang Jawa, untuk menyebut lembaga pendidikan Islam itu terkadang dengan istilah “pondok” atau “pesantren” atau merangkai keduanya menjadi “pondok pesantren”, tetapi dengan maksud yang sama. Hanya saja kemudian sering dibedakan antara pesantren salaf, yang berorientasi pada pelestarian tradisi dengan sistem pendidikan tradisional dengan pesantren modern, yang sudah banyak mengadopsi sistem pendidikan sekolah modern Barat.

¹⁹Mughits, *Kritik Nalar*, 119.

²⁰Ibid, 120.

Tidak adanya kata sepakat dalam mendefinisikan “santri” atau kata turunannya “pesantren” adalah sangat wajar dengan melihat kompleksitas unsur-unsur dan fungsi pesantren sehingga tidak mungkin merumuskan definisi pesantren dalam pengertian yang komprehensif, lebih-lebih jika hanya dengan satu-dua perspektif saja dengan menutup mata dimensi-dimensi yang lain. Sebagaimana dimaklumi bahwa hanya mengambil sebagian unsurnya dengan meninggalkan unsur-unsur yang lainnya jelas akan menghasilkan pengertian dan pemahaman yang tidak utuh. Tetapi menyebut semua unsurnya juga akan menghasilkan definisi yang sangat panjang. Perlu perumusan definisi yang singkat tetapi yang mencakup atau menggambarkan keseluruhannya. Minimal definisi itu dapat menggambarkan lima unsur pokok pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, dan Kiai.

Salah satu definisi yang dipandang representatif untuk maksud di atas adalah definisi dari Departemen Agama: Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam umumnya kegiatan tersebut diberikan dengan cara nonklasikal (sistem bandongan dan sorongan) dimana seorang kiai mengajar para santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan para santri biasanya tinggal di dalam pondok atau asrama pesantren tersebut.²¹

2. Unsur –unsur Pesantren

²¹Ibid, 123.

Menurut Zamakhsari Dhofier bahwa tradisi pesantren terdiri dari lima elemen dasra, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik, dan kyai. Jika suatu lembaga telah memiliki unsur-unsur tersebut, maka sudah dapat di sebut sebagai pesantren. Sedangkan menurut A. Mukti Ali, unsur-unsu pokok itu hanya empat, yaitu kiai, santri, masjid dan asrama, tanpa menyebut unsur pengajaran kitab-kitab klasik.²²

a. Kiai

“Kiai” secara etimologis berarti alim ulama’ atau cerdas pandai dalam agama Islam.²³ Dalam pengertian yang lebih luas lagi kiai adalah seorang ahli agama yang banyak berperan sebagai konsultan agama di lingkungan masyarakat tradisional, terutama di daerah pedesaan, meskipun tidak memangku pesantren, sehingga sering dikenal sebagai kiai (imam) langgar atau kiai (imam) masjid, yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, seperti pesantren. Meskipun demikian, kiai jenis ini pada umumnya justru memiliki akses social yang kuat dengan masyarakat lingkungannya.²⁴

Dalam terminology pesantren kiai adalah pendiri, pemilik, pengasuh, pimpinan, guru tertinggi dan komando tertinggi (*sole determinant*) pesantren, pengayom santri dan masyarakat sekitarnya serta konsultan agama (*spiritual*).²⁵

²²Ibid, 143-144.

²³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 435.

²⁴Mughits, *Kritik Nalar*, 145.

²⁵Ibid, 146.

Kebanyakan para kiai beranggapan bahwa suatu pesantren dapat di ibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dimana kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and outhority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Para santri selalu berharap dan berpikir bahwa kiai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri (*self-confident*), baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren.

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang jama'ah, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Menurut Abdul Mughist, masjid di pesantren merupakan pusat kegiatan intelektual dan spiritual yang digunakan untuk kajian kitab-kitab utama dengan system bandongan oleh seorang kiai.²⁶

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak masjid Qubba didirikan pada masa Nabi Muhammad hingga kini tetap terpancar dalam sistem di pesantren.

²⁶Ibid, 148.

Lembaga-lembaga pesantren memelihara terus tradisi ini. Para kiai selalu mengajar murid-muridnya di masjid dan menganggap masjid sebagai tempat paling tepat untuk menanamkan disiplin para santri dalam mengerjakan kewajiban shalat lima waktu, memperoleh pengetahuan agama dan kewajiban agama yang lainnya.²⁷

c. Santri

Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kiai bilamana memiliki pesantren dan santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari kitab-kitab Islam klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam lembaga pesantren. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dua bagian:

1. *Santri mukim*, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren kebanyakan merupakan satu kelompok tersendiri yang memang bertanggung jawab mengurus kepentingan pesantren sehari-hari, mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri muda tentang kitab-kitab dasar dan menengah.
2. *Santri kalong*, yaitu murid-murid yang berasal dari desa di sekitar pondok pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk

²⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011), 86.

mengikuti pelajaran di pesantren, mereka bolak-balik dari rumahnya sendiri.²⁸

Khususnya di pesantren, terminologi santri memiliki dua makna, yaitu makna yang sempit dan makna yang luas. Makna sempit santri adalah para siswa yang masih belajar di pesantren dengan mengecualikan para guru (ustaz) sebagai pembantu kiai. Sedangkan makna luasnya adalah orang yang pernah belajar di pesantren, baik santri dalam pengertian pengertian pertama tadi maupun ustaz, dan baik masih yang tinggal di pesantren maupun para alumni yang sudah tinggal di luar pesantren.²⁹

d. Pengajaran Kitab Islam Klasik (Kitab Kuning).

Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik, terutama karangan ulama' yang memuat faham syafi'i, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan mengajar para calon-calon ulama'.³⁰ Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren dapat di golongkan ke dalam 8 kelompok jenis pengetahuan: 1. Nahwu (syntax) dan shorof (morfologi); 2. Fiqh; 3.Usul fiqh; 4.Hadith; 5.Tafsir; 6.Tauhid; 7.Tasawuf dan etika dan 8.Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.

Kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadith, tafsir, fiqh, usul

²⁸Ibid, 89.

²⁹Mughits, *Kritik Nalar*, 149.

³⁰Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 86.

fiqh dan tasawuf. Kesemuanya dapat pula di golongkan ke dalam tiga kelompok tingkatan yaitu: 1. Kitab dasar 2. Kitab tingkat menengah 3. Kitab tingkat tinggi.³¹

Kitab kuning bagi pondok pesantren merupakan simbol kelestarian transmisi intelektual. Kitab kuning dan pondok pesantren merupakan dua sisi yang tidak bisa di pisahkan dan tidak bisa saling meniadakan. Ibarat mata uang, antara satu sisi dengan sisi lainnya saling terkait erat. Eksistensi kitab kuning dalam pesantren menempati posisi yang urgen, sehingga dipandang sebagai salah satu unsur yang membentuk wujud pesantren itu sendiri.

Istilah kitab kuning adalah sebutan untuk kitab-kitab berbahasa arab yang di tulis di atas kertas berwarna kuning. Istilah ini adalah asli Indonesia, khususnya Jawa, sebagai salah satu identitas tradisi pesantren dan untuk membedakan jenis kitab lainnya yang di tulis di atas kertas berwarna putih.³²

Di samping itu, di pesantren juga di terapkan sistem hafalan untuk kitab-kitab tertentu, terutama kitab-kitab ilmu alat (tata bahasa arab). Metode inilah yang membedakan metode pendidikan di pesantren modern atau sekolah-sekolah umum. Dan dengan metode hafalan ini, di samping juga dengan sistem penerjemahan kitab dengan makna “gundul” atau “arab pegon”, pada umumnya pesantren salafi berhasil dalam menciptakan kader-kader ilmu alat yang kapabel, di banding

³¹ Ibid. 87.

³² Mughits, *Kritik Nalar*, 150.

pesantren modern, meski dalam cabang dan aspek lain pesantren modern memiliki kelebihan dibanding pondok salafi, seperti dalam penguasaan bahasa Arab aktif (*muhaddasah*).³³

e. Pondok (Asrama)

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan istilah sebutan “kyai”. Asrama untuk para santri berada dalam lingkungan kompleks pesantren dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

Pondok, asrama bagi para santri, merupakan ciri khas tradisi pesantren, yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di Negara-negara lain. Pondok tempat tinggal santri merupakan elemen paling penting dari tradisi pesantren, meskipun kadang pondok sangat sederhana, namun para santri yang baru datang dari tempat tinggalnya untuk melanjutkan pelajaran di suatu wilayah yang baru itu, tidak perlu mengalami kesukaran dalam tempat tinggal atau penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yang baru.³⁴

f. Sistem nilai etika pesantren

³³ Ibid. 153

³⁴ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 85.

Sebagaimana klaim pesantren salaf pada umumnya bahwa yang membedakan antara pesantren salaf dan modern adalah ajaran etikanya, yakni jika pesantren salaf sangat memperhatikan ajaran etika, sebaliknya pesantren modern kurang memperhatikannya, sehingga santri lulusan pesantren modern ini sering di nilai kurang membawa ajaran etika dalam berperilaku, meski penilaian ini juga masih tampak bias-nya dan terlalu mahal untuk digeneralisasikan.

Tentang ajaran etika ini, pada dasarnya ajaran tentang bagaimana pola pergaulan atau berhubungan yang baik antara unsur-unsur (anggota) pesantren, seperti pola hubungan antara santri dan kiai yang merupakan hubungan ketaatan yang tak terbatas. Jika sementara hipotesis mengatakan bahwa tradisi pengagungan tersebut merupakan warisan tradisi lokal pra-islam, hal itu bukan berarti sama sekali tidak bersandar pada ajaran ulama terdahulu, seperti ajaran etika dalam kitab *Ta'lim al-muta'alim* karya asy-Syaikh az-Zarnuji.³⁵

3. Tawaran pengembangan pesantren

Permasalahan seputar pengembangan model pendidikan pondok pesantren dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (*human resources*) merupakan isu aktual dalam arus perbincangan kepesantrenan kontemporer. Maraknya perbincangan mengenai isu tersebut tidak bisa di lepaskan dari realitas empirik keberadaan pesantren dewasa ini yang di nilai kurang mampu

³⁵Mughits, *Kritik Nalar*, 155.

mengoptimalkan potensi yang di miliknya. Setidaknya terdapat dua potensi besar yang dimiliki pesantren yaitu potensi pendidikan dan pengembangan masyarakat.³⁶

Terkait dengan problemaengan perubahan sosial akibat modernisasi ataupun globalisasi, kalangan internal pesantren sendiri sebenarnya sudah mulai melakukan pembenahan. Salah satu bentuknya adalah pengembangan model pendidikan formal (sekolah), mulai tingkat SD sampai perguruan tinggi, di lingkungan pesantren dengan menawarkan perpaduan kurikulum keagamaan dan umum serta perangkat ketrampilan teknologis yang dirancang bangun secara sistematis integralistik. Pengembangan model pendidikan formal semacam ini telah menjadi trend yang di adopsi oleh kebanyakan Pondok Pesantren di tanah air, seperti Pesantren Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, (Jombang), Pesantren Darul Ulum (Peterongan, Jombang), Pesantren Darus Sholah (Jember), dan berbagai pesantren lainnya.

Ada pula sebagian pesantren yang memperbaharui sistem pendidikannya dengan menciptakan model pendidikan modern yang tidak lagi terpaku pada sistem pengajaran klasik (*wetonan, bandongan*) dan materi kitab-kitab kuning. Tetapi, semua sistem pendidikan mulai dari teknik pengajaran, materi pembelajaran, sarana dan prasarananya di desain berdasarkan sistem pendidikan modern. Modifikasi pendidikan pesantren semacam ini telah dieksperimentasikan oleh beberapa pondok pesantren

³⁶ H. M. Sulthon, *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Persepektif Global* (Yogyakarta :Laksbang Presindo, 2006), 26.

seperti Pesantren Darussalam (Gontor, Ponorogo), Pesantren As salam (Pabelan, Surakarta), Pesantren Darun Najah (Jakarta), dan pesantren Al amin (Prenduan, Sumenep, Madura).

Sementara itu, tidak semua pesantren melakukan pengembangan sistem pendidikannya dengan cara memperluas cakupan wilayah garapannya dan/atau memperbaharui model pendidikannya. Masih banyak pesantren yang mempertahankan sistem pendidikan tradisional dan konvensional dengan membatasi diri pada pengajaran kitab-kitab klasik dan pembinaan moral keagamaan semata.³⁷

4. Model Pembuatan Keputusan di Pesantren

Model pembuatan keputusan di pesantren dapat mengkombinasikan model-model keputusan di atas sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Selain itu, dapat dikembangkan *model pembuatan keputusan partisipatif* yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran pesantren. Dalam keputusan partisipatif pihak yang paling kompeten di libatkan adalah guru/ustadz sebagai ujung tombak pendidikan pesantren. Dengan demikian, secara operasional keputusan partisipatif mengandung arti partisipasi guru dan/atau pihak lain dalam pembuatan keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi aktifitas atau tugas pekerjaan mereka di pesantren.

³⁷ Ibid, 27-28.

Partisipasi guru dalam pembuatan keputusan di pesantren di anggap penting karena beberapa alasan, partisipasi akan meningkatkan komunikasi antar guru dan administrator sekaligus meningkatkan kualitas pembuatan keputusan pendidikan pesantren. Kedua, partisipasi akan dapat memberikan kontribusi terhadap mutu kehidupan kerja mereka. Dan ketiga, partisipasi dapat mendorong profesionalisasi pendidikan dan demokratisasi lembaga pesantren.

Selanjutnya agar partisipasi guru dan pihak lain dapat efektif, perlu sebuah pengasuh pesantren merancang atau mendesain mekanisme partisipasi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik antara guru dan pengasuh yang merugikan pesantren.³⁸

³⁸ Ibid, 54.